

SOSIOLOGI POLITIK

1. Arti atau Makna Sosiologi Politik

Para spesialis tidak sepakat tentang arti sosiologi politik yang tepat. Sosiologi politik penuh dengan gagasan yang saling bertentangan.

- a. Salah satu anggapan adalah sosiologi politik sebagai ilmu negara.

Mendefinisikan sosiologi politik sebagai ilmu negara berarti menempatkannya dalam klasifikasi ilmu sosial, yang didasarkan pada sifat masyarakat yang dipelajari. Itu adalah konsep politik. Di sini, negara bisa berupa negara-bangsa atau negara-pemerintah. Sebuah negara-bangsa menunjuk pada masyarakat nasional. Sebuah negara-pemerintah menunjuk para penguasa dan pemimpin masyarakat nasional ini. Untuk membuat sosiologi politik, ilmu tentang negara berarti mengisolasi kajian tentang masyarakat nasional, menyebabkan makna sosiologi politik ini agak sempit dan terbatas.

Definisi Greer dan Orleans (1964:810) lebih mirip dengan gagasan ini, dengan perhatian utamanya pada "penjelasan tentang struktur sosial yang khas yang disebut negara". Penganut lain gagasan ini adalah Jellinck (Sosiolog Jerman) dan Marcel Prelot (sejarawan Prancis). Untuk menghubungkan sosiologi politik dengan ilmu negara mungkin sedikit atau tidak ada relevansinya dalam masyarakat kontemporer.

- b. Pengertian kedua, sosiologi politik adalah proses interaksi antara masyarakat dan politik. Pandangan Bendix dan Lipset (1957:87) lebih pas di sini. Mereka mengatakan "ilmu politik dimulai dengan negara dan meneliti bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat sementara sosiologi politik dimulai dengan masyarakat dan meneliti bagaimana hal itu mempengaruhi negara". Meski merupakan perbaikan atas pengertian pertama, tetap saja hal itu tidak menyampaikan dimensi total sosiologi politik. Kritikus menyebutnya sebagai sifat reduksionis, karena itu lebih mirip dengan sosiologi tentang politik daripada sosiologi politik. Perbedaan penting antara sosiologi politik dan ilmu politik diuraikan secara rinci oleh Sartori (1969).

- c. Gagasan atau konsepsi ketiga tentang sosiologi politik dikemukakan oleh Maurice Duverger lebih modern. Duverger berpendapat bahwa sosiologi politik adalah ilmu kekuasaan, pemerintahan, otoritas komando, di semua masyarakat manusia (termasuk masyarakat nasional). Konsepsi ini mendapatkan inspirasi dari Leon Duguit. Dia membuat perbedaan antara pemerintah (governor) dan yang diperintah. Leon Duguit

percaya bahwa dalam setiap kelompok manusia, dari yang terkecil sampai yang terbesar, ada yang memerintah dan yang taat, yang memberi perintah dan yang mematuhi, yang membuat keputusan, dan yang mematuhi. Banyak penulis kontemporer menerima definisi sosiologi politik ini dengan mungkin sedikit modifikasi terutama di antara mereka adalah Max Weber, Raymond Aron, Georges Vedel, Georges Burdeau dan Maurice Duverger. Interpretasi Maurice Duverger penting karena menyamakan sosiologi politik dengan power atau ilmu kekuasaan. Meskipun interpretasinya lebih disukai, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa itu lebih dekat dengan kenyataan.

Kesulitan definisi Maurice Duverger berasal dari 2 (dua) sudut:

- 1) Konsep kekuasaan itu luas dan tidak jelas. Ukuran dan kompleksitas kelompok menambah kebingungan.
- 2) Konsep ilmu kekuasaan menciptakan kebingungan tentang masyarakat universal; masyarakat dan otoritas swasta dalam kelompok dasar dan kelompok kompleks.

Namun, interpretasi Maurice Duverger tentang sosiologi politik lebih bermanfaat, karena melalui premis dasar ini dapat diidentifikasi Evolusi Sosiologi Politik.

2. Sejarah Perkembangan Sosiologi Politik

Setidaknya ada 4 (empat) periode menjadi ciri sejarah perkembangan sosiologi politik:

a. Periode Klasik

Ada pada zaman Yunani dan Romawi ketika manusia dipandang sebagai hewan politik. Pada zaman yang sangat kuno, manusia dianggap sebagai hewan sosial dan politik. Begitu pula Aristoteles sebagai bapak Ilmu Politik, dalam karyanya *Politics* menyatakan bahwa keluarga adalah akar dari mana negara berasal. Pada periode abad pertengahan, Santo Agustinus juga berpendapat bahwa masyarakat dipandu oleh prinsip-prinsip ketuhanan. Gereja, Negara, dan Masyarakat dipelajari dengan cara yang saling terkait, tetapi Gereja dianggap sebagai institusi paling ilahi atau paling tinggi.

b. Periode *The Great Debate* (Periode Kekaisaran Romawi Suci):

Didefinisikan ulang dalam istilah gerejawi murni dan dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tahap sejarah ini terjadi selama *enlightment* (Pencerahan) ketika perdebatan ideologis besar berkecamuk atas dua prinsip yang berlawanan:

- 1) Apakah manusia dimaksudkan untuk melayani negara, atau

2) Apakah negara dirancang untuk melayani manusia dan masyarakat.

Satu kelompok, membedakan antara negara dan masyarakat. Mereka mengutamakan masyarakat dan kemauan umum rakyat atas negara. Filsuf sebagai kelompok kedua tidak membuat dan menerima perbedaan apa pun antara negara dan masyarakat dan menganjurkan kontrol tertinggi dan total negara atas semua aspek kehidupan rakyat. Mereka memberikan fokus yang tajam pada individu sebagai unit dasar.

c. Periode *The Strong Role of Elite Society* (Periode yang tumbuh dari debat sebelumnya dan berkembang selama abad ke-19).

Pada abad ke-17 para penguasa feodal menjadi sangat kuat. Mereka mulai menggunakan kekuatan politik di negara bagian. Kelas elit memandang pemerintah sebagai organisasi politik tertutup dan mengabadikan diri yang menjalankan kekuasaan negara atas rakyat. Fokus pada peran elit dalam masyarakat modern. Dialog berkembang antara kelompok elitis tradisional, yang memandang pemerintah sebagai sistem politik yang tertutup, mengabadikan diri, dan elitis demokratis yang mendukung pandangan yang lebih terbuka dan kemanusiaan tentang pemerintah dan politik.

d. *The Contemporary Period* (Periode sosiologi politik kontemporer)

Abad ke-20 dibuka sebagai era demokrasi dan pembangunan, tetapi kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan antara negara-negara demokratis dan kediktatoran. Perilaku politik manusia dalam masyarakat dan perilaku kelompok. Akhir Perang Dunia Kedua menyoroti kemenangan Demokrasi atas Kediktatoran. Pada masa modern dicirikan sebagai lebih empiris, analitik, dan eklektik dalam kedalaman dan ruang lingkungannya. Sosiolog politik modern pada prinsipnya peduli dengan pengembangan generalisasi yang dapat diverifikasi secara empiris yang menghubungkan masyarakat dan politik, dengan pembangunan teori sebagai fokus utama pembangunan.

Sosiologi politik kontemporer berkaitan dengan politik budaya sebagai apa yang kita sebut sebagai "*politic of politic*." Dari perspektif ini, apa arti peristiwa bagi mereka yang menafsirkan dan menindaklanjutinya adalah hal yang penting. Apa yang dianggap "politik" dalam hal konten dan gaya harus terlebih dahulu dibuat politik; itu harus dibuat terlihat dan relevan dengan visi tentang bagaimana hubungan sosial dan dapat diatur, apa

yang dibuat politik tidak hanya terbatas pada apa yang terjadi di dalam pemerintahan, partai politik dan negara. '(Nash, 2010).

3. Kerangka Teoritis Sosiologi Politik

a. Pluralisme

- 1) Melihat politik terutama sebagai pertarungan antar kelompok kepentingan yang bersaing.
- 2) Distribusi kekuasaan politik tidak ditentukan oleh kepentingan ekonomi tetapi oleh berbagai divisi sosial dan agenda politik.
- 3) Demokrasi pluralistik ini bersumber dari masyarakat berbasis kelas dari marginal hingga elit.
- 4) Persatuan dalam kelas sosial yang beragam adalah pluralisme. Misalnya, gerakan terorganisir yang mengekspresikan apa yang mungkin tampak sebagai perubahan radikal dalam masyarakat seringkali dapat digambarkan sebagai tidak sah.

b. Teori elit

Terkadang disebut pendekatan yang berpusat pada negara.

Ini menjelaskan apa yang dilakukan negara dengan melihat kendala dari struktur organisasi, pengelola negara semi-otonom, dan kepentingan yang muncul dari negara sebagai organisasi unik yang memusatkan kekuasaan.

c. Analisis kelas

Tumpang tindih dengan Analisis Marxis (Perjuangan kelas-Masyarakat yang berbeda bervariasi, dari konflik kelas yang berbeda, masyarakat feodal hingga masyarakat Kapitalis, Proletariat vs Borjuasi).